

**PERAN CORPORATE GOVERNANCE  
TERHADAP PENERAPAN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT:  
STUDI PERBANDINGAN BANK INDONESIA DAN BANK MALAYSIA**

**Karina Aulia Putri, Rita Anugerah & Novita Indrawati**

**Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau**

**E-mail: karinaauliaputri@gmail.com**

**ABSTRACT**

*Corporate governance is a system, process, set of rules that regulate relationships between various interested parties in order to achieve an organizational goal. Therefore, corporate governance is expected to improve the implementation of enterprise risk management. This study has several objectives: first, to examine the role of corporate governance in implementing ERM at Indonesia's Bank. Second, to examine the role of corporate governance in implementing ERM at Malaysia's Bank. Third, to see the difference in the implementation of ERM influenced by corporate governance in the two countries (Indonesia and Malaysia). Data is obtained from the annual reports of companies listed on the IDX and KLSE for the period of 2016-2017. Using SPSS 21 the results of this study show that corporate governance (independent commissioners, audit committee meetings, risk monitoring committee funds, and competencies of these committees) has an influence on the implementation of ERM in Indonesia. While, Malaysia, only independent commissioners and risk monitoring committee's meetings influence the implementation of ERM. The results of this study confirm that the implementation of ERM in both countries (Indonesia and Malaysia) is different, because the practice of corporate governance between the two countries is also different.*

**Keyword:** *Enterpris risk management, corporate governance*

**LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Tujuan perbankan Indonesia secara umum adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat/masyarakat (UU No. 10 Tahun 1998). Tujuan bank yang berkaitan dengan masyarakat luas lah yang mengharuskan bank untuk lebih berhati- hati dalam mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional bank. Oleh sebab itu bank harus menjaga kesehatannya melalui penilaian tingkat kesehatan bank.

Pada prinsipnya, tingkat kesehatan merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari manajemen bank sama halnya seperti pengelolaan bank dan kelangsungan usaha bank. Oleh sebab itu, bank wajib untuk memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan menerapkan manajemen risiko dalam melaksanakan setiap kegiatan usahanya (Ikatan Bankir Indonesia, 2016 : 4).

Penerapan manajemen risiko sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK 03/ 2016 Bab II pasal 2 (1) yang menyatakan bahwa bank harus menerapkan manajemen risiko perusahaan secara efektif baik untuk bank secara individu atau bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak, POJK

menyatakan bahwa bank wajib menerapkan manajemen risiko karena dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bank menghadapi berbagai macam risiko seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategik, dimana kedelapan risiko tersebut harus dikelola secara baik agar tingkat kesehatan bank menjadi lebih efektif, karena manajemen risiko ini termasuk salah satu aspek dalam penilaian tingkat kesehatan bank.

Di Indonesia, manajemen risiko ini sudah mulai serius dilaporkan sebagai dampak dari Pedoman Manajemen Risiko Berbasis Governance Tahun 2012 yang diatur dalam Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Meskipun demikian, penerapan tersebut masih lemah, karena penerapan manajemen risiko perusahaan ini belum terlalu merujuk kepada laporan pengungkapan. Tjahjono (2017) menyatakan salah satu faktor lemahnya pengungkapan manajemen risiko adalah kurangnya pengawasan dari komisaris yaitu melakukan *review* terhadap profil risiko perusahaan, hal ini terbukti beberapa perusahaan memiliki profil risiko yang sama selama periode 2014 dan 2015, profil risiko tersebut tidak diperbarui oleh manajemen perusahaan sama sekali. Padahal profil risiko ini sangat penting oleh perusahaan karena di profil risiko ini lah terdapat penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank (Ikatan Bankir Indonesia, 2016 : 8).

Selain pengawasan komisaris, komite audit sebagai perpanjangan tangan komisaris juga berpengaruh terhadap penerapan manajemen risiko berdasarkan POJK18/ POJK 03/2016. Selain itu Komite pemantau risiko yang sifatnya sudah wajib di dunia perbankan juga di indikasi dapat mempengaruhi penerapan *enterprise risk management*. Selain itu kantor akuntan publik dinilai dapat mempengaruhi penerapan manajemen risiko melalui tekanan- tekanan yang diberikan selama proses audit Golshan dan Rasid (2012).

Penelitian mengenai penerapan *enterprise risk management* ini semakin banyak dilakukan oleh peneliti akuntansi (misal Al-Najjar,2014; Alzharani dan Khaled, 2015; Buckby, 2015; Tjahjono,2017; Herlantu dan Pratiwi, 2014; Probohudono, 2013), namun penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini merupakan penelitian perbandingan dua negara, penelitian ini akan melihat bagaimana *corporate governance* negara Indonesia dan Malaysia akan mempengaruhi penerapan *enterprise risk management* di kedua negara tersebut.

Kedua, penelitian ini mencoba memakai alat ukur baru untuk variabel *corporate governance* (komite pemantau risiko), penelitian- penelitian sebelumnya hanya melihat melalui keberadaan komite tersebut. Tetapi penelitian ini ingin melihat dari sisi efektivitas komite pemantau risiko yang dinilai melalui frekuensi rapat, kompetensi dan ukuran.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *corporate governance* yang dilihat melalui komisaris independen, efektivitas komite audit, komite pemantau risiko dan reputasi kantor akuntan publik berpengaruh terhadap penerapan *enterprise risk management* di Perbankan Indonesia dan Malaysia, serta untuk melihat perbedaan penerapan *enterprise risk management* di Negara Indonesia dan Malaysia.

## KAJIAN PUSTAKA

### Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

#### **Pengaruh Komisaris independen terhadap Penerapan *Enterprise risk management (ERM)***

Golshan (2012) menyatakan pendapatnya terhadap hasil penelitian yang di lakukan pada 90 perusahaan yang terdaftar di Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE) bahwa pembentukan komisaris Independen/ non-excetive independent didalam dewan akan mempengaruhi kualitas tugas yang dilaksanakan, yakni tugas pengawasan. Hal ini disebabkan karena komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan perusahaan secara langsung atau tidak langsung, seperti hubungan sebagai pegawai atau hubungan keluarga dengan manajemen perusahaan, komisaris independen berperan sebagai perwakilan dari stakeholders karena mereka dianggap independen. Hal ini sangat berkaitan dengan *agency theory*, yang mengharuskan adanya suatu pengawasan dari pihak independen terhadap pihak manajemen selaku agent yang menjalankan operasional perusahaan. Untuk menghindari tindakan-tindakan yang mungkin hanya bertujuan untuk kepentingan agent, sehingga berpotensi merugikan pihak pemegang saham (principal). Maka berdasarkan penjelasan diatas hipotesis yang diajukan :

H<sub>1</sub> : Komisaris independen berpengaruh terhadap *enterprise risk management* di Sektor Perbankan Indonesia

H<sub>2</sub> : Komisaris independen berpengaruh terhadap *enterprise risk management* di Sektor Perbankan Malaysia

#### **Pengaruh Efektivitas Komite Audit terhadap Penerapan *ERM***

Berdasarkan fungsinya, komite audit merupakan alat bantu dewan komisaris / board of directors, dalam pelaksanaan manajemen risiko perusahaan. *Blue Ribbon committee (RB) on Improving the Effectiveness of Corporate Audit Committee* menyatakan untuk meningkatkan keefektifan komite audit, diperlukan peningkatan dari meeting frequency (aktivitas dari komite audit yang diukur dari waktu rapat komite audit tersebut), (*financial literacy* kompetensi yang dimiliki oleh anggota komite audit) serta jumlah minimal yang dipersyaratkan adalah 3 orang. Maka berdasarkan penjelasan diatas hipotesis yang diajukan :

H<sub>3</sub> : Efektivitas komite audit berpengaruh terhadap penerapan *enterprise risk management* di Sektor Perbankan Indonesia

H<sub>4</sub> : Efektivitas komite audit berpengaruh terhadap penerapan *enterprise risk management* di Sektor Perbankan Malaysia

#### **Pengaruh Efektivitas Komite Pemantau risiko terhadap Penerapan *ERM***

Dikutip dari *center for risk management studies* yang menyatakan bahwa Di Indonesia, keberadaan Komite pemantau risiko khusus perbankan sudah bersifat wajib, karena mengingat tingginya risiko yang melekat pada aktivitas bisnis perbankan. Industri perbankan juga memiliki keunikan tersendiri, ditunjukkan dari tingginya rasio hutang terhadap modal pada industri tersebut (dapat mencapai 9:1). Sama halnya dengan komite audit, komite pemantau risiko juga akan dilihat melauai tiga hal yaitu meeting frequency (aktivitas dari komite yang diukur dari waktu rapat komite tersebut), *financial literacy* (kompetensi yang dimiliki oleh anggota komite) serta jumlah minimal yang dipersyaratkan adalah 3 orang. Sehingga dari penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan :

H<sub>9</sub> : Efektivitas komite pemantau risiko berpengaruh terhadap penerapan *enterprise risk management* di perbankan Indonesia

H<sub>10</sub> : Efektivitas komite pemantau risiko berpengaruh terhadap penerapan *enterprise risk management* di perbankan Malaysia

#### **Pengaruh Reputasi KAP terhadap Penerapan ERM**

Manurung (2016) yang meneliti hubungan reputasi auditor pada 50 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2013-2014 menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan audit dengan menggunakan jasa auditor dari KAP *big four* dapat dikatakan efektif dalam pengelolaan manajemen risiko dan dapat berjalan dengan baik serta mengacu kepada *corporate governance* di dalam melakukan pengawasan. Hal ini disebabkan KAP *big four dipercaya* dapat memberikan tekanan yang lebih besar untuk menerapkan dan melakukan pengungkapan *enterprise risk management*. Maka dari penjelasan diatas, hipotesis yang akan diuji adalah :

H<sub>15</sub> : reputasi kantor akuntan publik berpengaruh terhadap penerapan *enterprise risk management* di Sektor Perbankan Indonesia

H<sub>16</sub> : reputasi kantor akuntan publik berpengaruh terhadap penerapan *enterprise risk management* di Sektor Perbankan Malaysia

#### **Perbedaan penerapan ERM di Negara Indonesia dan Malaysia**

Maulani (2015) yang meneliti di perbankan Indonesia dan Malaysia berpendapat bahwa pedoman *good corporate governance* bagi perbankan sangat bergantung pada sistem dewan yang diterapkan pada negara yang bersangkutan yang akan mempengaruhi pengungkapan *enterprise risk management* perusahaan. Di Indonesia sendiri merupakan negara yang menerapkan sistem dua dewan (*two tier board system*) sementara Malaysia menganut sistem satu dewan (*one tier*).

H<sub>17</sub> : Ada perbedaan terhadap penerapan *enterprise risk management* di Perbankan Indonesia dan Perbankan Malaysia

## **METODE PENELITIAN**

### **Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia dan bursa efek Malaysia periode 2016 – 2017. sampel dalam penelitian ini diperoleh melalui *purposive sampling*. Dengan kriteria (1) perbankan yang tidak menerbitkan laporan tahunan 2016-2017 secara berturut-turut. Dari kriteria tersebut didapat sampel 38 untuk Bank Indonesia dan 19 Untuk Bank Malaysia. Dimana total sampel 2 tahun adalah 76 untuk Indonesia dan 38 untuk Malaysia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode

### **Teknik Anlisi Data**

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS vers 21. Sebelum analisis regresi dilakukan, uji asumsi klasik harus dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan apakah model regresi sudah memenuhi asumsi normalitas, autokorelasi dan multikolinearitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji multikolinieritas

**Tabel 1**  
**Uji Multikolinieritas**

	Perbankan Indonesia		Perbankan Malaysia	
	Tolerance	VIF	Tolerance	VIF
Ukuran komite audit (KA)	0,633	1,581	0,252	3,963
Rapat komite audit (RKA)	0,654	1,528	0,317	3,155
Kompetensi komite audit (KKA)	0,674	1,484	0,236	4,242
Ukuran Komite pemantau risiko (KMR)	0,506	1,977	0,273	3,659
Rapat Komite pemantau risiko (RKMR)	0,752	1,329	0,441	2,265
Kompetensi Komite manajemen risiko (KKMR)	0,596	1,706	0,537	1,862
Reputasi Akuntan Publik (KAP)	0,686	1,457	0,912	1,097
Komisaris Independen (KI)	0,901	1,109	0,794	1,259

Sumber: data sekunder yang diolah tahun 2019

Dari tabel di atas, diperoleh nilai VIF seluruh variabel bebas di kedua negara < 10 dan tolerance > 0,10. Dapat diartikan bahwa model regresi bebas dari multikolinieritas.

#### Uji Normalitas

**Tabel 2**  
**Uji Normalitas**

	Perbankan Indonesia		Perbankan Malaysia	
	Unstandardized		Unstandardized	
N	76	N	38	
Kolmogorov- smirnov Z	0,551	Kolmogorov- smirnov Z	0,665	
Asymp. Sig (2-tailed)	0,922	Asymp. Sig (2-tailed)	0,769	

Sumber: data sekunder yang diolah tahun 2019

Berdasarkan uji Kolmogorov Smirnov di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar yang lebih besar dari 0,05. Dapat diartikan bahwa model regresi kedua negara memenuhi asumsi normalitas

#### Uji Autokorelasi

Hasil perhitungan di Indonesia menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi dikarenakan ; Nilai DW > Du ; 2,296 > 1,6655 dan Nilai DW < 4-DU ; 2,296 < 2,3345

Sementara di Malaysia, terdapat masalah uji autokorelasi pada model regresi tersebut, untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan uji tambahan, yaitu dengan melakukan Run Test. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). Uji run test didapat nilai signifikansi pada uji *run test* sebesar 0,869 yakni lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa tidak adanya gangguan autokorelasi pada penelitian ini, sehingga model penelitian ini layak digunakan.

### Uji Heteroskedastisitas

Dari gambar Scatterplot yang diuji terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dapat diartikan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas dalam model regresi penelitian di kedua negara

### Uji Hipotesis Perbankan Indonesia

**Tabel 3**  
**Uji t Perbankan Indonesia**

Model	Unstandardized coefficients	sig	Kesimpulan
1 ( Constant)	0,753	0,000	
Ukuran komite audit (KA)	(-) 0,005	0,395	Tidak berpengaruh
Rapat komite audit (RKA)	0,002	0,026	Berpengaruh signifikan
Kompetensi komite audit (KKA)	0,014	0,002	Berpengaruh signifikan
Ukuran Komite manajemen risiko	0,471	0,004	Berpengaruh signifikan
Rapat Komite manajemen risiko	0,16	0,001	Berpengaruh signifikan
Kompetensi Komite manajemen risiko	0,109	0,026	Berpengaruh signifikan
Reputasi Akuntan Publik (KAP)	0,030	0,011	Berpengaruh signifikan
Komisaris Independen (KI)	0,041	0,004	Berpengaruh signifikan

Sumber: data sekunder yang diolah 2019

Dari tabel di atas dapat dibuat persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$ERM = 0,753 + 0,041 KI - 0,005 KA + 0,014 KKA + 0,002 RKA + 0,016 RKMR + 0,109 KKMR + 0,471 KMR + 0,030 KAP + e$$

Sementara untuk uji koefisien determinasi diperoleh nilai *R square* sebesar 0,539. Artinya adalah bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel sebesar 53,9%. Sedangkan sisanya 46,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

### Uji Hipotesis Perbankan Malaysia

**Tabel 4**  
**Uji t Perbankan Malaysia**

Model	Unstandardized coefficients	sig	Kesimpulan
1 ( Constant)	0,944	37,803	0,000
Ukuran komite audit (KA)	(-) 0,004	(-) 0,689	0,496
Rapat komite audit (RKA)	(-) 0,001	(-) 0,796	0,432
Kompetensi komite audit (KKA)	0,008	1,730	0,094
Ukuran Komite manajemen risiko	0,004	0,684	0,499
Rapat Komite manajemen risiko	0,001	2,075	0,029
Kompetensi Komite	0,004	0,905	0,373

Model	Unstandardized coefficients	sig	Kesimpulan
manajemen risiko			
Reputasi Akuntan Publik (KAP)	(-) 0,11	(-) 1,616	0,117
Komisaris Independen (KI)	0,079	2,664	0,012

Sumber: data sekunder yang diolah 2019

Dari tabel di atas dapat dibuat Persamaan regresi berganda sebagai berikut :  
 $ERM = 0,944 + 0,079 KI - 0,04KA + 0,008 KKA - 0,001 RKA + 0,001 RKMR + 0,004 KKMR + 0,004 KMR - 0,011 KAP + e$

Sementara untuk uji koefisien determinasi diperoleh nilai R square sebesar 0,539. Artinya adalah bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel sebesar 39,6 %. Sedangkan sisanya 60,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

### Uji Beda (*Independent t test*)

Dari uji statistic diketahui nilai penerapan *enterprise risk management* bernilai 0,8509 untuk Perbankan Indonesia dan 0,9291 untuk perbankan Malaysia. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan *enterprise risk management* di perbankan Malaysia lebih tinggi/ efektif dibanding dengan penerapan *enterprise risk management* di Perbankan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh perbedaan penerapan corporate governance yang diterapkan oleh kedua negara.

Chairman IICD, Sigit Pramono, juga mengakui bahwa Indonesia masih tertinggal dari sejumlah negara ASEAN dalam hal penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut Sigit, Ada beberapa perbandingan yang bisa dilihat misalnya di Malaysia untuk menjadi direksi atau komisaris perusahaan publik, itu harus ikut pelatihan-pelatihan atau ada syarat yang harus dipenuhi para calonnya dan mereka juga setiap setahun sekali akan menjalani test independensi untuk komisaris independennya. Tetapi di Indonesia belum ada peraturan mengenai hal ini. Hal ini sesuai dengan peraturan *Malaysian code corporate governance* menyatakan bahwa setiap dewan non-executive akan mengikuti pelatihan setiap tahun untuk menjaga independensinya.

### Pembahasan

#### Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penerapan *Enterprise Risk Management*

Hasil tabel 4.3 menunjukkan bahwa hipotesis pertama dapat diterima (variabel komisaris independen berpengaruh terhadap penerapan *enterprise risk management* di Perbankan Indonesia) dan pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa hipotesis kedua juga dapat diterima (variabel komisaris independen berpengaruh terhadap penerapan *enterprise risk management* di Perbankan Malaysia).

Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya komisaris independen pada sebuah bank akan berpengaruh terhadap penerapan *enterprise risk management*. Hal ini disebabkan karena komisaris independen tidak akan bias dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seperti melakukan pengawasan terhadap pengungkapan manajemen risiko pada bank yang berguna untuk menginformasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan, karena komisaris independen tidak mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan, baik dengan dewan direksi, komisaris, maupun pemegang saham. Golshan ( 2012 ) menyatakan pendapatnya bahwa hal ini berkaitan erat dengan *agency theory*,

bahwa harus ada fungsi pengawasan dari pihak independen terhadap pihak manajemen yang bertindak selaku agent yang menjalankan operasional perusahaan, untuk menghindari tindakan-tindakan yang mungkin hanya bertujuan untuk kepentingan agent, sehingga berpotensi merugikan pihak pemegang saham (principal).

#### **Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Penerapan *Enterprise Risk Management***

Hasil tabel 3 menunjukkan bahwa hipotesis ketiga tidak dapat diterima (ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap penerapan *enterprise risk management* di Perbankan Indonesia), dan tabel 4 menunjukkan juga bahwa hipotesis keempat tidak dapat diterima (ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap penerapan *enterprise risk management* di Perbankan Malaysia). Alasan yang dapat menjelaskan hasil penelitian ini adalah perbankan membentuk komite audit masih sebatas untuk memenuhi peraturan saja dan sebatas melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja perbankan yang berkaitan dengan review pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan, belum memperhatikan perihal pengungkapan aktivitas manajemen risiko perusahaan, yang semestinya dapat digunakan untuk meningkatkan citra perbankan sehingga banyak investor yang tertarik untuk menanamkan sahamnya dikarenakan perbankan tersebut memiliki penerapan manajemen risiko yang efektif.

#### **Pengaruh Kompetensi Komite audit terhadap Penerapan *Enterprise Risk Management***

Hasil tabel 3 menunjukkan bahwa kompetensi komite audit berpengaruh terhadap penerapan *enterprise risk management* di Perbankan Indonesia. Al- Najjar and Abed ( 2014 ) menyatakan bahwa, dengan kompetensi komite audit yang dimiliki oleh salah satu anggota komite audit, akan membuat komite audit tersebut bisa memahami kondisi financial maupun non financial dari perusahaan. Dengan adanya berbagai macam kompetensi tersebut diharapkan komite audit akan mudah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dari *enterprise risk management* itu sendiri.

Sementara tabel 4 menunjukkan bahwa kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap penerapan *enterprise risk management* di Perbankan Malaysia. Hal diatas menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki komite audit tidak terlalu berpengaruh karena tanggung jawab dasar dari komite audit yang banyak membuat komite audit tidak hanya fokus mengawasi penerapan manajemen risiko sehingga membuat kompetensi yang dimiliki anggota tadi tidak akan efektif digunakan dalam mengawasi manajemen risiko perbankan Malaysia.

#### **Pengaruh Rapat Komite Audit terhadap Penerapan *Enterprise risk management***

Hasil tabel 3 menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap penerapan *enterprise risk management* di Perbankan Indonesia. Rapat Komite Audit diharapkan mampu secara pro-aktif maupun evaluative menelaah semua hal-hal penting mengenai pelaporan keuangan perusahaan. Dengan sering bertemu, misalnya dengan auditor eksternal dan manajer, Komite Audit dapat menginformasikan dan menambah pengetahuan tentang masalah akuntansi dan manajemen risiko di dalam perusahaan (Buckby, 2015).

Sementara tabel 4 menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap penerapan *enterprise risk management* di Perbankan Malaysia. Hal ini dikarenakan beban tugas dan tanggung jawab komite audit yang tidak hanya melakukan pengawasan pada penerapan manajemen risiko, komite audit memiliki beban kerja yang banyak jika dibanding komite- komite lain dibawah dewan komisaris.

#### **Pengaruh Rapat Komite Pemantau risiko terhadap Penerapan *Enterprise risk management***

Hasil tabel 3 menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite manajemen risiko berpengaruh terhadap penerapan *enterprise risk management* di Perbankan Indonesia). Dan tabel 5 menunjukkan frekuensi rapat komite manajemen risiko berpengaruh terhadap penerapan *enterprise risk management* di Perbankan Malaysia. Hasil diatas menunjukkan bahwa Frekuensi rapat memang menjadi aktivitas penting bagi perbankan di Indonesia maupun Malaysia karena hal ini menunjukkan bentuk tanggung jawab pengawasan yang dilakukan Komite manajemen risiko dalam penerapan manajemen risiko. Rapat Komite manajemen risiko diharapkan mampu secara pro-aktif maupun evaluative menelaah semua hal-hal penting mengenai pelaporan keuangan perusahaan. Dengan sering bertemu dapat menginformasikan dan menambah pengetahuan tentang masalah masalah yang muncul akibat risiko di dalam perusahaan

#### **Pengaruh Kompetensi Komite Pemantau Risiko terhadap Penerapan *Enterprise risk management***

Hasil tabel 3 menunjukkan bahwa kompetensi komite manajemen risiko berpengaruh terhadap penerapan *enterprise risk management* di Perbankan Indonesia. Dikutip dari *center for risk management studies* yang menyatakan bahwa komite pemantau risiko tentu akan menghadapi berbagai tantangan. Untuk itu, komite manajemen risiko membutuhkan kompetensi khusus untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Untuk sektor perbankan, berdasarkan laporan tahunan Pemimpin komite harus memiliki kompetensi di bidang ekonomi, terutama pada bidang perbankan, moneter, dan keuangan.

Sementara Tabel 4 menunjukkan bahwa kompetensi komite manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap penerapan *enterprise risk management* di Perbankan Malaysia. Hal ini menunjukkan hal ini bisa disebabkan bahwa perbankan Malaysia sangat mengandalkan rapat yang diadakan oleh komite manajemen risiko untuk membahas hal- hal yang diperlukan dalam menerapkan manajemen risiko seperti membahas penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko terintegrasi, serta perubahannya apabila diperlukan.

#### **Pengaruh Ukuran Komite Pemantau Risiko terhadap Penerapan *Enterprise risk management***

Hasil tabel 3 menunjukkan bahwa ukuran komite manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap penerapan *enterprise risk management* di Perbankan Indonesia. Hasil tabel 4 menunjukkan bahwa ukuran komite manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap penerapan *enterprise risk management* di Perbankan Malaysia. Alasan yang dapat menjelaskan hasil penelitian ini adalah perbankan membentuk komite manajemen risiko masih sebatas untuk memenuhi peraturan saja dan sebatas melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja perbankan yang berkaitan dengan aktivitas manajemen risiko perusahaan.

### **Pengaruh Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap Penerapan *Enterprise risk management***

Hasil tabel 3 menunjukkan bahwa reputasi kantor akuntan publik berpengaruh terhadap penerapan *enterprise risk management* di Perbankan Indonesia. Kantor akuntan publik yang termasuk dalam *bigfour* merupakan kantor akuntan publik yang mempunyai reputasi dan kualitas audit yang terpercaya. Dengan hasil yang berpengaruh antara reputasi auditor terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* menunjukkan bahwa Perbankan Indonesia yang menggunakan jasa audit pada KAP *bigfour* akan lebih luas dalam melakukan pengungkapan *Enterprise Risk Management* daripada Perbankan Indonesia yang menggunakan jasa audit non *bigfour*. Hasil ini terlihat dari 43 Perbankan Indonesia telah menggunakan jasa audit *bigfour* dan memiliki nilai ERM yang tinggi dibanding 33 Perbankan Indonesia.

Sementara hasil tabel 4 menunjukkan bahwa ukuran komite manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap penerapan *enterprise risk management* di Perbankan Malaysia. Sedikit berbeda dengan Indonesia, di Malaysia hampir seluruh perusahaan yang masuk dalam Kuala Lumpur Stock Exchange seluruhnya hampir diaudit oleh Kantor Akuntan Publik big four. Terdapat tekanan yang lebih besar pada perusahaan yang diaudit *big four* untuk menerapkan dan mengungkapkan ERM .

### **SIMPULAN**

Hasil penelitian ini menemukan bahwa struktur *corporate governance* yaitu komisar independen memiliki pengaruh terhadap penerapan ERM, diharapkan ke independensi-annya dapat meningkatkan kualitas pengungkapan ERM di ke dua perbankan. Untuk efektivitas komite audit di perbankan Indonesia, bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap penerapan *ERM*, karena kompetensi dan rapat komite auditlah yang diduga akan meningkatkan efektivitas komite audit dalam menerapkan *ERM*. Sementara di Malaysia, efektivitas audit tidak berpengaruh sama sekali terhadap penerapan *ERM*. Di Malaysia lebih berpengaruh Rapat Komite dan Manajemen Risiko untuk meningkatkan penerapan ERM. Sementara di Indonesia, tidak cukup hanya rapat saja, tetapi kompetensi komite pemantau risiko harus diperhatikan untuk meningkatkan penerapan *ERM*. Sementara untuk reputasi KAP, di Indoneisa reputasi dianggap berpengaruh terhadap penerapat *ERM*, sementara di Malaysia tidak berpengaruh terhadap penerapaan *Enterprise Risk Management*.

#### **Keterbatasan**

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah waktu penelitian yang singkat yaitu 2 tahun dan hanya menganalisis dari segi *corporate governance* saja.

#### **Saran**

Berdasarkan keterbatasan ini, maka dapat disarankan untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah variabel data keuangan seperti ukuran perusahaan, leverage atau profitabilitas untuk melihat penerapan *enterprise risk management*. Dan akan lebih bagus jika peneliti selanjutnya juga mengembangkan Objek penelitian, menjadi ASEAN.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Najjar, Basil. 2014. The association between disclosure of forward - looking information and corporate governance mechanism. *Managerial auditing journal*. Vol 29 Iss 7 pp. 578-595.
- Alzharani, Abdullah Mohammed dan Khaled Salmen Aljaaidi. 2015. An emperical investigation of audit committe effectiveness and risk management : evidence from Saudi Arabia. *IBFR Accounting and Taxation*. Vol 7, No.1, pp. 39-49.
- Bank Indonesia. 1998. *UU No.10 tahun 1998, Tentang Perubahan Terhadap UU No. 7 tahun 1992*, Jakarta
- Buckby, Sherrena et.al. 2015. An analysis of risk management disclosure : Australian evidence. *Managerial Auditing Journal*. Vol. 30, ISS 8/9 pp. 812-869.
- Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. 2004. Enterprise Risk Management, Integrated Framework (COSO-ERM Report). New York: AICPA.
- Crockett, Andrew. 1997. Why is financial stability a goal of public policy?. *A federal reserve bank of kansas city journal*. Hal 1-18
- Desender, kurt. 2007. "On the Determinants of Enterprise Risk Management Implementation". *Managing Worldwide Operations & Communications with Information Technology*, 115 – 118. *Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona*.
- Golshan, Nargess Mottaghi dan Siti Zaleha Abdul Rasid. 2012. Determinants of Enterrise Risk Management Adoption : An Emperical Analysis of Malaysian Public Listed Firms. *World Academy of Science, Engineering and Technology*. Page 453- 460.
- Herlantu, Vianika dan Andri Prastiwi. 2014. Pengaruh karakteristik komite audit, karakteristik perusahaan dan kompensasi dewan terhadap komite manajemen risiko. *Diponegoro journal of accounting*. Volume 3, nomor 3, Tahun 2014, Hal 1-14.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2016. Manajemen Risiko : *Supervisi Manajemen Risiko Bank*. Gramedia : Jakarta.
- Iyer, Venkatarama et.al. 2013. Characteristics of audit committee financial experts : an emperical study. *Managerial Auditing Journal*. Volume 28, nomor 1, Tahun 2013, pp 65-78.
- Khan, Majid Jamal Dildar Hussain Waqar. 2016. Why do firms adopt enterprise risk management. *Management decision*. Vol 54, Iss 8,.
- Manurung, Daniel T.H dan R. Wedi Rusmawan Kusumah. 2016. Telaah enterprise risk management melalui corporate governance dan konsentrasi kepemilikan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol. 7 No 3, Desember 2016, hal 341-354.
- Maulani, Hikmi Fauziah dan Sri Rahayu. 2015. Pengaruh komposisi dewan komisaris independen, ukuran komite audit dan ukuran perusahaan terhadap pengadopsian entrprise risik managment. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* Vol. 2 No 2, April 2015, 345-356.
- Probohudono, A. N., G. Tower and Rusmin R. 2013. Risk Disclosure During The Global Financial Crisis. *Social Responsibility Journal*. Vol 09. No 1. page 124-136

Razaee, Zabihollah. 2009. *Corporate Governance and Ethics*. Jhon Wiley & Sons.Inc

Tjahjono, Subagio. 2017. Enterprise risk management implementation maturity in non bank and financial companies. *Etikonomi*. Vol 16 (2), pp 173-186. E-ISSN : 2461-0771

### Internet Sources

Bryan, Daniel, M.H. Carol liu and Samuel L. Tiras. 2004. The influence of Indeendent and effective audit committee on Earning Quality, <http://ssrn.com>, tanggal 10 April 19

Bursa Malaysia.2018. Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE) Listing Requirements 2018. Kuala Lumpur: KLSE. Alamat Web : [http://www.bursamalaysia.com/misc/system/assets/5957/MAIN\\_Chap15\\_CA\\_fair\\_2Jan2018.pdf](http://www.bursamalaysia.com/misc/system/assets/5957/MAIN_Chap15_CA_fair_2Jan2018.pdf), tanggal 12 Desember 2018

Center for risk management studies. 2016. Fungsi dan peran komite pemantau risiko serta kontribusinya dalam penerapan enterprise risk management di Indonesia. Alamat web : <http://crmsindonesia.org/publications/fungsi-dan-peran-komite-pemantau-risiko-serta-kontribusinya-dalam-penerapan-enterprise-risk-management-di-indonesia/>. tanggal 12 Desember 2018

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Jakarta. Diakses tanggal 12 November 2018.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2012. Pedoman Manajemen Risiko berbasis Governance. Jakarta. Diakses tanggal 12 November 2018.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55 / POJK 04 / 2015, tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. tanggal 12 Desember 2018

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18 / POJK 03 / 2016, tentang manajemen risiko perbankan. tanggal 12 Desember 2018

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55 / POJK 03 / 2016, tentang penerapan tata kelola bagi Bank Umum. tanggal 12 Desember 2018